

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah salah satunya berasal dari Dana Alokasi Umum, dimana dana Alokasi Umum itu bersumber dari dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jumlah DAU yang ada di Kabupaten Bantul untuk tahun 2009 sebesar 568 milyar rupiah jumlah ini lebih kecil dari DAU yang diterima oleh Kabupaten Bantul pada tahun 2008 yaitu 583 milyar rupiah.

Jumlah keseluruhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang ada di Kabupaten Bantul pada tahun 2009 yaitu Rp 931.789.051.390,08, sedangkan untuk tahun 2008 sebesar Rp 1.102.570.241.800,00. Perolehan pendapatan daerah dari Dana Alokasi Umum sangatlah besar, yaitu sekitar 60% dari jumlah keseluruhan jumlah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bantul, dengan jumlah yang tersebut Dana Aloksai Umum memiliki peranan yang sangat besar dalam APBD Kabupaten Bantul. Untuk belanja pegawai dalam APBD Kabupaten Bantul berasal dari Dana Alokasi Umum. Dana Alokasi Umum di Kabupaten Bantul sebagian besar dipergunakan untuk membiayai belanja tidak langsung yang salah satunya adalah belanja pegawai. Dana Alokasi Umum di

Kabupaten Bantul yang digunakan untuk membiayai gaji Pegawai Negeri sipil pada tahun 2009 adalah 521 milyar rupiah sedangkan biaya gaji Pegawai Negeri Sipil untuk tahun 2008 adalah 491 milyar rupiah. Biaya Gaji Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Bantul tersebut sekitar 85% dari jumlah keseluruhan anggaran Dana Alokasi Umum. Adanya perubahan alokasi dana untuk biaya gaji Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Bantul tersebut disebabkan kenaikan belanja pegawai dan kenaikan jumlah pegawai.

Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Bantul juga mendapatkan tambahan penghasilan resmi diluar gaji yaitu tunjangan kesejahteraan yang besarnya untuk setiap Pegawai Negeri Sipil bervariasi sesuai dengan golongan dan eselonnya. Tunjangan kesejahteraan ini diberikan untuk meningkatkan kegairahan kerja Pegawai Negeri Sipil yang nantinya Pegawai Negeri Sipil dapat memusatkan perhatian, pikiran, dan tenaganya hanya untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya.

B. Saran

- a. Sehubungan dengan gaji Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Bantul yang masih tergantung pada Dana Alokasi Umum, sebaiknya Pemerintah Kabupaten Bantul agar lebih memperhatikan potensi-potensi daerah untuk menggali sumber pendapatan asli daerah agar kedepan nanti Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dapat menjadi Pemerintah Daerah yang mandiri.
- b. Adanya gaji dan tunjangan kesejahteraan yang diberikan kepada Pegawai Negeri sipil di Kabupaten Bantul, sebaiknya setiap Pegawai Negeri Sipil

dalam menjalankan tugas-tugasnya dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab untuk kemajuan dan pembangunan Kabupaten Bantul.

- c. Diperlukan efisiensi dalam pelaksanaan pekerjaan pemerintah untuk mencegah adanya pengeluaran yang tidak diperlukan, serta diperlukan ketepatan dalam penempatan Pegawai Negeri Sipil dalam formasi yang ada sehingga pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan tersebut dapat berjalan secara baik.
- d. Dengan Ketergantungan pemberian Gaji Pegawai tersebut terhadap Dana Alokasi Umum, maka apabila Pemerintah Pusat akan menaikkan Gaji Pegawai seharusnya juga disertai dengan pembiayaan yang mencukupi yang nantinya tidak membebani keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Hadjon, dkk, 2001, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Moh. Mahfud MD, 1988, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Riawan Tjandra, 2006, *Hukum Keuangan Negara*, Penerbit Grasindo, Jakarta.
- Rosali Abdulah,H, 2005, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sumantri, D.A, 1988, *Hukum Administrasi Kepegawaian*, Penerbit IND-HILL-CO, Jakarta.
- Sastra Djatmika dan Marsono, 1995, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Sukamto, 2004, *Pengatur Eksistensi dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah*, CV.Hanggar Kreator, Yogyakarta.
- Sri Hartini, dkk, 2008, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tim Prima Pena, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gita Media Press
- Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Fakultas Hukum, *Pedoman Penulisan Hukum/Skripsi*.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 Tentang Pengaturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2000 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.



LAMPIRAN

**DATA PNS KABUPATEN BANTUL
PER 01 OKTOBER 2009**

NO	INSTANSI	JUMLAH
1	Sekretariat Daerah	4
2	Staf Ahli	3
3	Bagian Umum	100
4	Bagian Administrasi Pembangunan	25
5	Bagian Hukum	18
6	Bagian Pemerintahan Desa	23
7	Bagian Kerjasama dan Potensi Daerah	20
8	Bagian Tata Pemerintahan	21
9	Bagian Hubungan Masyarakat	24
10	Bagian Protokol	16
11	Sekretarian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	50
12	Sekretariat Komisi Pemilihan Umum	5
13	Kantor Arsip	14
14	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	47
15	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa	34
16	Kantor Pemuda dan Olahraga	15
17	Kantor Pengelolaan Data Telematika	20
18	Kantor Perpustakaan	33
19	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	75
20	Kantor Pengelolaan Pasar	109
21	Inspektorat	43
22	Badan Kepegawaian Daerah	53
23	BKKPP dan KB	102
24	Badan Lingkungan Hidup	39
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	48
26	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	128
27	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	117
28	Dinas Kesehatan	1.014
29	Dinas Pekerjaan Umum	234
30	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	36
31	Dinas Perijinan	36
32	Dinas Pendidikan Dasar	5.894
33	Dinas Pend. Menengah dan Non Formal	2.605
34	Dinas Sumber Daya Air	174
35	Dinas Perhubungan	75
36	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi	68
37	Dinas Pertanian dan Kehutanan	237
38	Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan	128
39	Dinas Sosial	41
40	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100
41	Bgian Organisasi	15
42	RSUD Penembahan Senopati	385
43	Kecamatan Bambanglipuro	27
44	Kecamatan Banguntapan	41
45	Kecamatan Bantul	32
46	Kecamatan Dlingo	31
47	Kecamatan Imogiri	28
48	Kecamatan Jetis	26
49	Kecamatan Kasihan	36
50	Kecamatan Kretek	31
51	Kecamatan Pajangan	24
52	Kecamatan Pandak	29
53	Kecamatan Piyungan	30
54	Kecamatan Pleret	25
55	Kecamatan Pundong	27
56	Kecamatan Sanden	32
57	Kecamatan Sedayu	32
58	Kecamatan Sewon	28
59	Kecamatan Srandakan	26
	JUMLAH	12.733

Ringkasan APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009

RINGKASAN APBD KABUPATEN BANTUL

TAHUN ANGGARAN 2009

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
A	<u>PENDAPATAN</u>	829.474.653.164,38
I	PENDAPATAN ASLI DAERAH	65.991.513.134,38
	- Pajak Daerah	13.000.000.000,00
	- Retribusi Daerah	38.366.191.550,00
	- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5.272.647.631,90
	- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	9.352.673.952,48
II.	DANA PERIMBANGAN	656.885.490.000,00
	- Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	32.740.490.000,00
	- Dana Alokasi Umum	568.510.000.000,00
	- Dana Alokasi Khusus	55.635.000.000,00
	- Dana Penyesuaian Infrastruktur dan Lainnya	-
III	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SYAH	106.597.650.030,00
	- Pendapatan Hibah	-
	- Dana Darurat	-
	- Dana Bagi Hasil Pajak dr Propinsi & Pemda Lainnya	41.216.251.900,00
	- Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemda lainnya	13.930.427.930,00
	- Dana P2TPD	-
	- Dana Penyesuaian Infrastruktur dan Lainnya	46.545.831.000,00
	- Dana Tunjangan Pendidikan	4.905.139.200,00

B.	<u>BELANJA</u>	888.818.903.466,00
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	609.777.817.771,00
	- Belanja Pegawai	533.231.014.246,00
	- Belanja Bunga	120.145.200,00
	- Belanja Subsidi	30.000.000,00
	- Belanja Hibah	7.225.272.000,00
	- Belanja Bantuan Sosial	39.119.541.000,00
	- Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota/Desa	3.907.026.900,00
	- Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kab./Kota/Desa	24.523.636.200,00
	- Belanja Tidak Terduga	1.621.182.225,00
II	Belanja Langsung	279.041.085.695,00
	- Belanja Pegawai	42.278.013.550,00
	- Belanja Barang dan Jasa	113.333.563.495,00
	- Belanja Modal	123.429.508.650,00
	SURPLUS (DEFISIT) (A)	(59.344.250.301,62)
C	<u>PEMBIAYAAN</u>	
I	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	
	- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	62.134.481.301,62
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	62.134.481.301,62
II	PENGELUARAAN PEMBIAYAAN	
	- Penyertaan modal	2.675.000.000,00
	- Pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo	115.231.000,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.790.231.000,00
	PEMBIAYAAN NETO	59.344.250.301,62
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	-

Sumber Data : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah , 2009



KABUPATEN BANTUL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2008

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN DAERAH				
11	Pendapatan Asli Daerah	59,069,544,315.41	69,800,761,508.85	10,731,217,193.44	18.16
111	Hasil Pajak Daerah1)	9,507,000,000.00	12,070,898,846.00	2,563,898,846.00	26.96
112	Hasil Retribusi Daerah 1)	31,479,627,550.00	37,171,638,611.00	5,692,011,061.00	18.08
113	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3,620,774,435.57	3,449,914,968.58	(170,859,466.99)	4.71
114	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	14,462,142,329.84	17,108,309,083.27	2,646,166,753.43	18.29
12	Dana Perimbangan	674,191,339,360.00	679,250,090,167.00	5,058,750,807.00	0.75
121	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	33,573,988,360.00	38,632,739,167.00	5,058,750,807.00	15.06
122	Dana Alokasi Umum	583,169,351,000.00	583,169,351,000.00	0.00	0.00
123	Dana Alokasi Khusus	57,448,000,000.00	57,448,000,000.00	0.00	0.00
13	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	262,710,819,230.00	274,539,356,083.00	11,828,536,853.00	4.50
131	Pendapatan Hibah	184,940,710,000.00	185,337,360,000.00	396,650,000.00	0.21
132	Dana Darurat	3,184,000,000.00	6,690,000,000.00	3,506,000,000.00	110.11
133	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	34,174,812,100.00	41,982,752,900.00	7,807,940,800.00	22.84
134	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	13,626,130,000.00	13,626,129,999.00	(1.00)	0.00
135	Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya	21,880,027,930.00	21,997,973,984.00	117,946,054.00	0.53
136	Dana Tunjangan Kependidikan	4,905,139,200.00	4,905,139,200.00	0.00	0.00
	Jumlah	995,971,702,905.41	1,023,590,207,758.85	27,618,504,853.44	
2	BELANJA DAERAH				
21	BELANJA TIDAK LANGSUNG	627,527,861,723.00	598,167,227,346.78	(29,360,634,376.22)	4.67
211	BELANJA PEGAWAI	491,538,098,432.00	468,562,523,987.00	(22,975,574,445.00)	4.67
212	BELANJA BUNGA	120,145,200.00	92,934,340.61	(27,210,859.39)	22.64
214	BELANJA HIBAH	11,190,000,000.00	11,190,000,000.00	0.00	0.00
215	BELANJA BANTUAN SOSIAL	68,265,769,364.00	65,973,535,442.00	(2,292,233,922.00)	3.35
216	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAH	1,824,216,600.00	1,822,216,600.00	(2,000,000.00)	0.10
217	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN	48,958,858,615.00	47,104,875,180.00	(1,853,983,435.00)	3.78
218	BELANJA TIDAK TERDUGA	5,630,773,512.00	3,421,141,797.17	(2,209,631,714.83)	39.24
22	BELANJA LANGSUNG	475,042,380,077.00	447,256,076,181.00	(27,786,303,896.00)	5.84
221	BELANJA PEGAWAI	47,272,805,950.00	42,306,374,948.00	(4,966,431,002.00)	10.50
222	BELANJA BARANG DAN JASA	119,134,917,707.00	102,189,334,334.00	(16,945,583,373.00)	14.22
223	BELANJA MODAL	308,634,656,420.00	302,760,366,899.00	(5,874,289,521.00)	1.90
	Jumlah	1,102,570,241,800.00	1,045,423,303,527.78	(57,146,938,272.22)	
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
31	Penerimaan Pembiayaan Daerah				
311	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	119,713,769,894.59	119,713,769,894.59	0.00	0.00



KABUPATEN BANTUL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2008

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
	Jumlah	119,713,769,894.59	119,713,769,894.59	0.00	
32	Pengeluaran Pembiayaan Daerah				
322	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	13,000,000,000.00	12,989,078,164.31	(10,921,835.69)	0.08
323	Pembayaran Pokok Utang	115,231,000.00	115,230,676.26	(323.74)	0.00
	Jumlah	13,115,231,000.00	13,104,308,840.57	(10,922,159.43)	
	PEMBIAYAAN NETTO	106,598,538,894.59	106,609,461,054.02		
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	0.00	84,776,365,285.09		



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)

Jln. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Fax. (0274) 367796
Website <http://www.bappeda.bantulkab.go.id>
E-mail : bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN / IZIN

Nomor : 070 / 1512

Membaca Surat : Dari : FaK.Hukum UAJY Yk. Nomor : 0791/V
Tanggal : 14 Oktober 2009 Perihal : **Ijin Penelitian**

Mengingat : 1 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 1983 tentang Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Daerah;
2 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 1983 tentang Pedoman Penmyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri ; dan
3 Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38/12/2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa.

Diizinkan kepada

Nama : **YANUAR ARAFA**
No.NIM/ NIM 09232/H MHS. UAJY YK
Judul : HUBUNGAN DANA ALOKASI UMUM DENGAN GAJI PEGAWI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN BANTUL.
Lokasi : BKD Kab. Bantul & Dinas PKAD Kab. Bantul.
Waktu : Mulai Tanggal : **28 Oktober 2009 s/d 28 Januari 2010**

Dengan ketentuan :

1. Terlebih dahulu menemui/melapor kepada pejabat Pemerintah setempat (Dinas/Instansi/Camat/Lurah setempat) untuk mendapat petunjuk seperlunya ;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (c/q Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta) dengan tembusan disampaikan kepada Bupati lewat Bappeda setempat;
4. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat izin ini dapat diajukan lagi untuk mendapatkan perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Kemudian diharap para pejabat Pemerintah setempat dapat memberikan bantuan seperlunya.

Dikeluarkan di : Bantul
Pada Tanggal : **28 Oktober 2009**

Tembusan dikirim kepada Yth

1. Bpk. Bupati Bantul
2. Ka. Kantor Kesbangpollinmas Kab Bantul
3. Ka. BKD Kab. Bantul.
4. Ka. Dinas PKAD Kab Bantul
5. Yang Bersangkutan
6. Pertinggal

A.n Bupati
Kepala Bappeda Kabupaten Bantul
Sekretaris
Subag Umum

JUMIA JUN. SH
NIP. 19541225197512.2.005